



**KINERJA DINAS PASAR UNIT PASAR TANJUNG KABUPATEN  
JEMBER DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

*Performance Of The Market Departement Tanjung Market Unit Jember Regency  
in Market Service Retribution Management*

**SKRIPSI**

Oleh

**Zulfikar Septian**

**NIM 120910201028**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**KINERJA DINAS PASAR UNIT PASAR TANJUNG KABUPATEN  
JEMBER DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Zulfikar Septian**  
**NIM 120910201028**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Suwandi, Ibunda Umamah, Kakak-Kakakku Wahyudi Nur Khakim, Umar Hadi Sucipto, dan Suhartutik serta keluarga yang telah berdoa dan memberikan dukungan tiada henti bagiku;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pemahaman; dan
3. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Asy-Syarh : 5-6)<sup>1</sup>

“Nasib adalah kesunyian masing-masing”.

(Chairil Anwar)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV Penerbit J-ART.

<sup>2</sup> Chairil Anwar. 1946. *Pemberian Tahu*. Puisi.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Zulfikar Septian

NIM : 120910201028

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak penar.

Jember,  
Yang menyatakan,

Zulfikar Septian  
NIM 120910201028

**SKRIPSI**

**KINERJA DINAS PASAR UNIT PASAR TANJUNG KABUPATEN  
JEMBER DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

*The Performance Of The Market Departement Tanjung Market Unit Jember  
Regency in Market Service Retribution Management*

Oleh

**Zulfikar Septian  
NIM 120910201028**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Dr. Ardiyanto, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota

: Dra. Inti Wasiati, MM.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 6 September 2017

jam : 08.30 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

**Ketua,**

**Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA**

**198103222005011000**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Ardiyanto, M.Si**

**195808101987021002**

**Anggota I,**

**Dr. Anastasia Murdyastuti**

**195805101987022001**

**Pembimbing Anggota,**

**Dra. Inti Wasiati, MM**

**195307311980022001**

**Anggota II,**

**Drs. Agus Suharsono, M.Si**

**196308141989031023**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**

**Dr. Ardiyanto, M.Si**

**195808101987021002**



## RINGKASAN

**Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar;** Zulfikar Septian, 120910201028; 2017; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu objek retribusi yang memiliki kontribusi positif sebesar 11,84% bagi pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Jember pada tahun 2012-2016. Kontribusi positif tersebut berasal dari hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar di 31 unit pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar. Pasar Tanjung menjadi kontributor terbesar yang mencapai 21,85% dari total penerimaan retribusi pelayanan pasar di seluruh pasar yang di Kabupaten Jember. Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Permasalahan tersebut terkait rata-rata pencapaian target retribusi yang masih rendah, yaitu 92,92% dari target yang ditentukan. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang mencukupi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi permasalahan dalam mewujudkan kinerja organisasi yang optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat. Data dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman .



Konsep yang digunakan untuk mengkaji kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar adalah konsep kinerja organisasi yang disampaikan Kumorotomo dan Purwanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dari segi kesesuaian dengan tujuan organisasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dengan hasil yang dicapai; 2) dari segi akuntabilitas menunjukkan adanya ketimpangan antara pertanggungjawaban terhadap pihak agent dan pertanggungjawaban kepada pihak principal; 3) dari segi efisiensi menunjukkan bahwa biaya pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang telah dilakukan lebih besar bila dibandingkan dengan hasil retribusi yang didapatkan dengan rata-rata rasio efisiensi yang dihasilkan sebesar 168,91%; 4) dari segi responsivitas menunjukkan bahwa telah diberikan kemudahan akses dalam penyewaan dan pembayaran retribusi, akan tetapi pelayanan pasar yang baik serta sikap yang cepat tanggap dalam menanggapi keluhan belum dapat ditunjukkan; 5) dari segi kesesuaian dengan visi dan misi organisasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output organisasi yang dihasilkan terhadap visi dan misi yang ditetapkan; 6) dari segi kualitas layanan yang diberikan menunjukkan bahwa kondisi kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar yang belum dapat dijaga dengan baik; 7) dari segi keadilan menunjukkan masih belum meratanya distribusi dan alokasi layanan yang diberikan; 8) dari segi sarana dan prasarana menunjukkan bahwa terdapat penggunaan sebagian sarana dan prasarana yang masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari penilaian terhadap 8 indikator kinerja organisasi publik yang belum dapat sepenuhnya terpenuhi oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan efisiensi manajemen kepegawaian dengan meningkatkan responsivitas, meningkatkan pelayanan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar, serta memperbaiki sarana dan prasarana pasar. Selain itu, petugas Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung juga diharapkan dapat lebih bersikap tegas dalam menjalankan peraturan yang berlaku.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Kedua dosen Pembimbing, Dr. Ardiyanto, M.Si. dan Dra. Inti Wasiati, MM terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Mulyono selaku operator Program studi Ilmu Administrasi Negara.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data terkait Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember; Dinas Pasar Kabupaten Jember; Seluruh Pegawai Kantor Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember; Ketua Gabungan Pedagang Tradisional Pasar Tanjung dan Sekitarnya; dan beberapa pedagang Pasar Tanjung Kabupaten Jember.

9. Teman-Teman Hendri Setia Pratama, Pradita Hakiki Arianda, M. Rifkiyatul Islam, Sufriantoro, Indah Lestari, Vella Rosita, Aprilia Nurlaily Utami, Anikmatul Karimah, Kholida Aisyah, Novia Ningsih, Danang Priambodo, Ridha Ageng Tricahyani, dan Riya Dhotus Sakinah yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2012. Terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
11. Teman-Teman Kos Agus Fadiyani, M. Dliyaur Rohman, Iqbal Qomarullah, Romy Elasando E.P., Ikhwan Nur Hadi, Billy Hakkun Lazuardi, Amar Ichsan, Agung S. Ruhutomo, M. Iftah Kurniawan, M. Nur Habibi dan Ramadhaniv yang telah menjadi teman kos selama ini dan menjadi rekan berdiskusi penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Penulis,

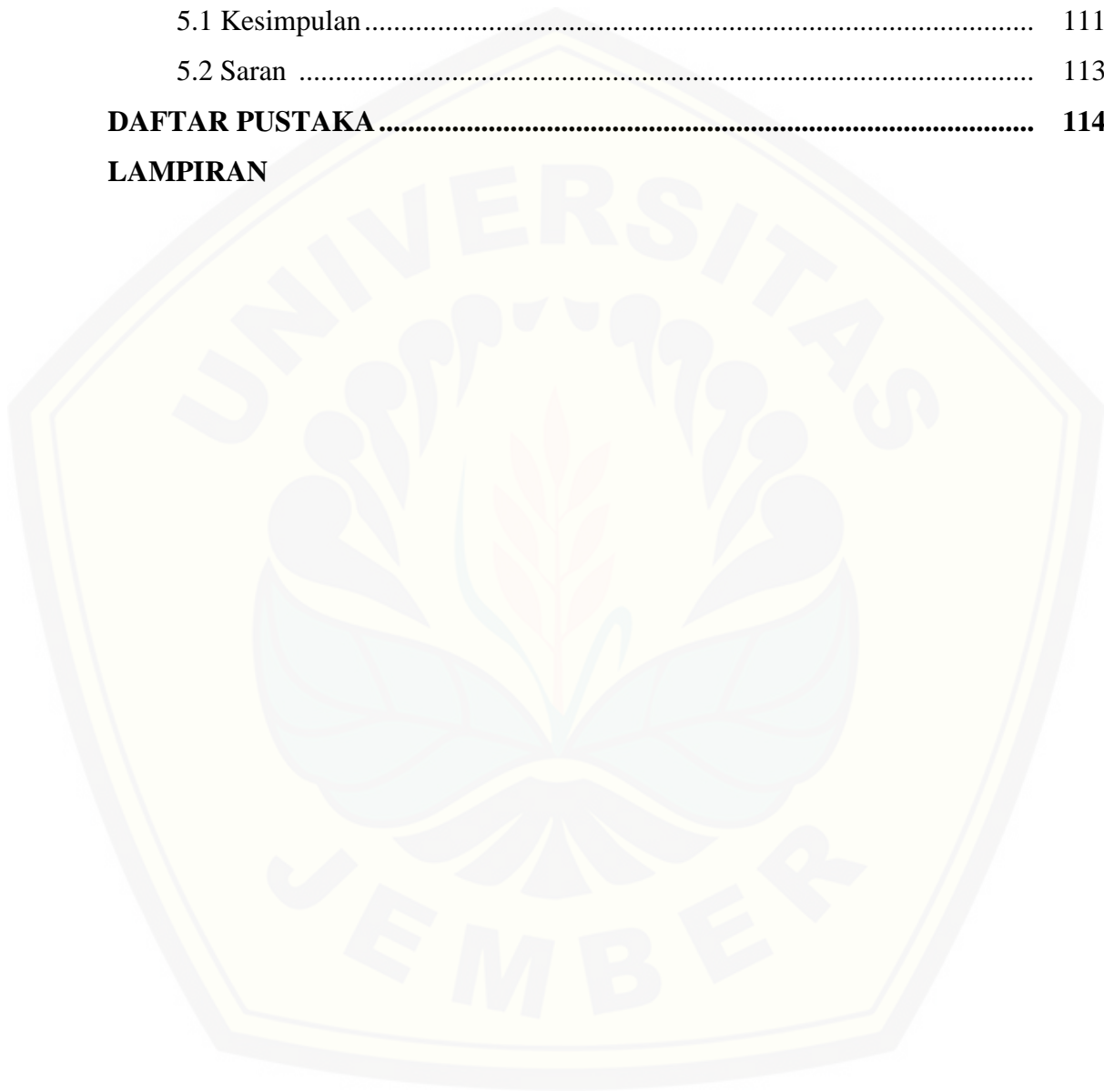
Zulfikar Septian

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3.Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Konsep Dasar .....	12
2.2 Organisasi Publik dalam Administrasi Publik.....	13
2.3 Kinerja Organisasi Publik .....	18
2.3.1 Definisi Kinerja Organisasi Publik .....	18
2.3.2 Indikator Kinerja Organisasi Publik .....	19
2.4 Pengelolaan .....	23
2.5 Retribusi Pelayanan Pasar .....	25
2.5.1 Retribusi Daerah .....	25
2.5.2 Pelayanan Publik .....	29

2.5.3 Pasar .....	31
2.5.4 Retribusi Pelayanan Pasar .....	32
2.6 Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
3.3 Data dan Sumber Data .....	39
3.5.1 Data Primer .....	39
3.5.2 Data Sekunder .....	43
3.4 Penentuan Informan Penelitian .....	44
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data .....	45
3.5.1 Observasi .....	46
3.5.2 Dokumentasi .....	46
3.5.3 Wawancara .....	47
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data .....	48
3.6.1 Ketekunan Pengamatan .....	48
3.6.2 Triangulasi .....	49
3.6.3 Pengecekan Sejawat .....	50
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data .....	50
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	54
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember .....	54
4.1.2 Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	55
4.1.3 Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung .....	61
4.2 Pembahasan .....	66
4.2.1 Sesuai dengan Tujuan Organisasi .....	68
4.2.2 Akuntabilitas .....	73
4.2.3 Efisiensi .....	79
4.2.4 Responsivitas .....	83
4.2.5 Sesuai dengan Visi dan Misi .....	87
4.2.6 Output yang Berkualitas .....	91

4.2.7 Keadilan .....	98
4.2.8 Sarana dan Prasarana .....	102
4.2 Matriks Hasil Penelitian .....	107
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





**DAFTAR TABEL**

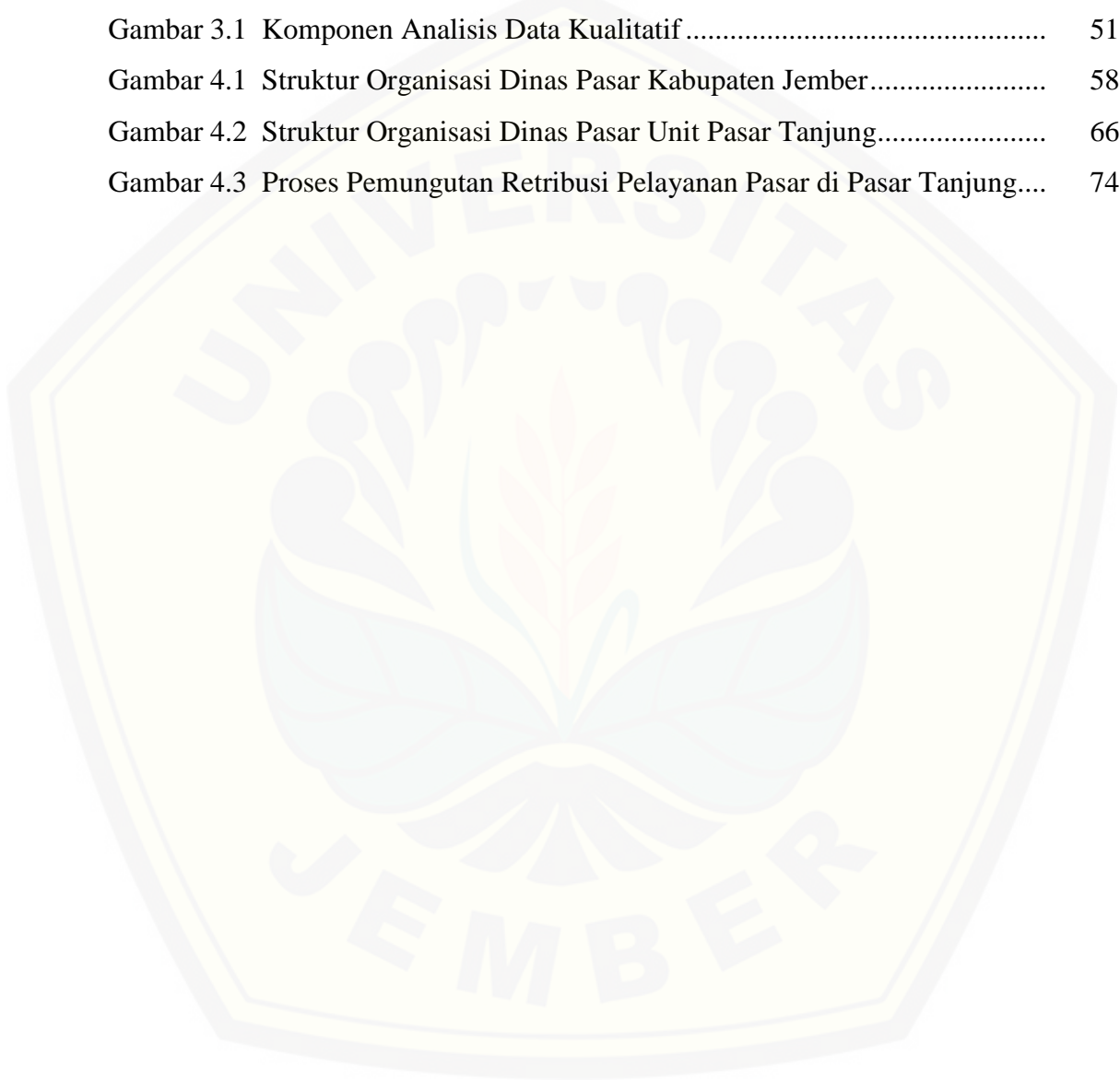
	Halaman
Tabel 1.1 Sepuluh Penerimaan PAD Kabupaten/Kota Terbesar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.....	2
Tabel 1.2 Lima Besar Kontribusi Jenis-Jenis Retribusi terhadap Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 .....	4
Tabel 1.3 Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Per Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016 .....	5
Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 .....	8
Tabel 2.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	26
Tabel 2.2 Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jember .....	34
Tabel 3.1 Data Sekunder Penelitian .....	43
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	45
Tabel 3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	48
Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 .....	54
Tabel 4.2 Kontribusi Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 .....	55
Tabel 4.3 Jumlah Toko di Pasar Tanjung Kabupaten Jember.....	62
Tabel 4.4 Jumlah Toko/Kios yang Kosong dan Terisi di Pasar Tanjung Tahun 2012-2016 .....	63
Tabel 4.5 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Tanjung.....	64
Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Tahun 2012-2016.....	65
Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 .....	71
Tabel 4.8 Biaya Belanja Pegawai di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 .....	80



Tabel 4.9	Biaya Kegiatan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016.....	81
Tabel 4.10	Biaya Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016 .....	81
Tabel 4.11	Hasil Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016.....	82
Tabel 4.12	Efisiensi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.....	82
Tabel 4.13	Daftar Inventaris Barang Pasar Tanjung .....	105
Tabel 4.14	Matriks Hasil Penelitian Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar .....	108

**DAFTAR GAMBAR**

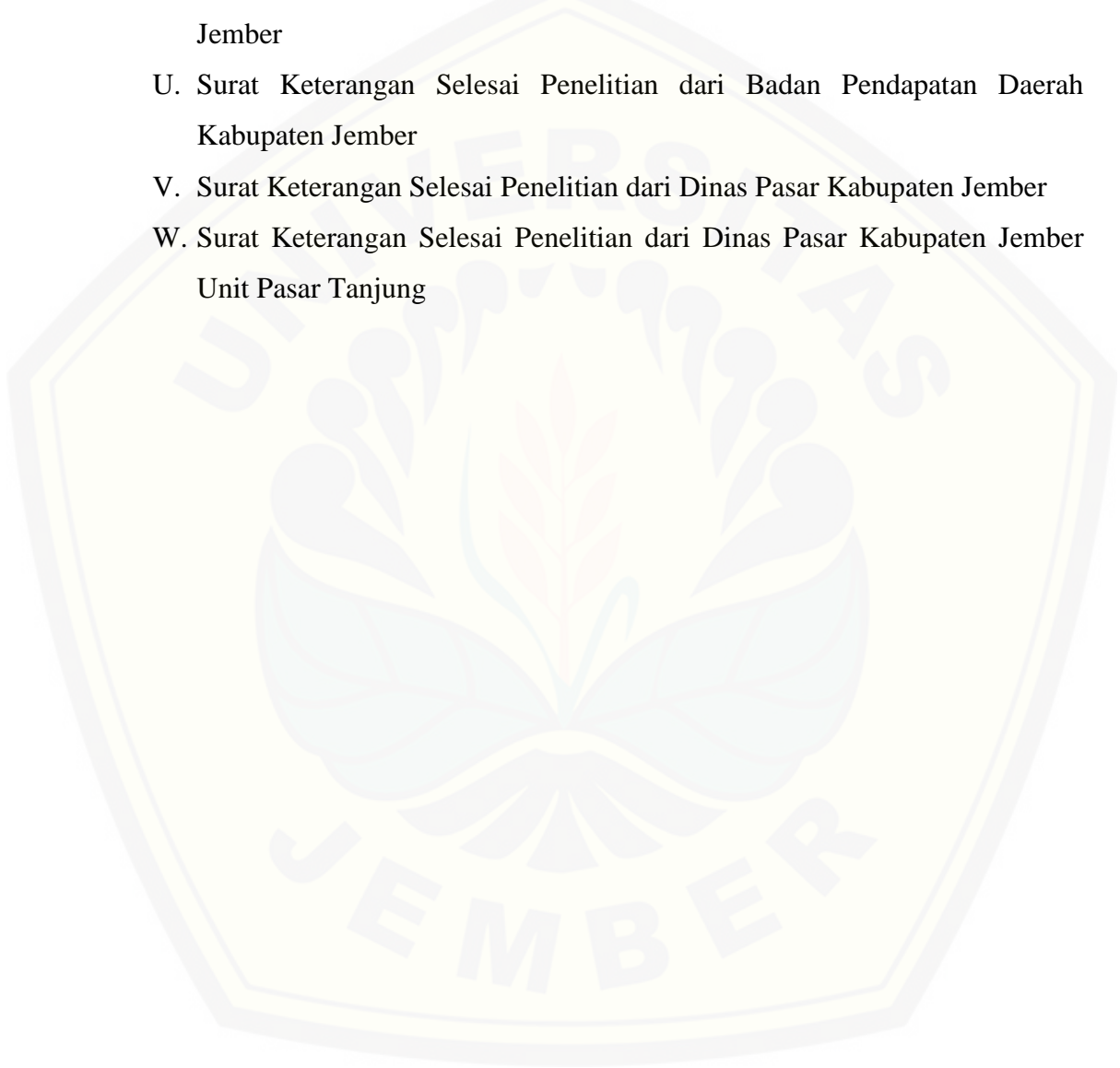
	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	35
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif .....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	58
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.....	66
Gambar 4.3 Proses Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Tanjung....	74



**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember
- B. Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember
- C. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Daerah Pemerintah Kabupaten Jember
- D. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/24/1.12/2016 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016
- E. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016
- F. Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2012-2016
- G. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Per Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016
- H. Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Unit Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2012
- I. Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Unit Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2013
- J. Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Unit Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2014
- K. Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Unit Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2015
- L. Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Unit Pasar Tanjung Tahun Anggaran 2016
- M. Daftar Pegawai Negeri Sipil Unit Pasar Tanjung Tahun 2016
- N. Daftar Pegawai Sukwan Unit Pasar Tanjung Tahun 2016
- O. Denah Pasar Tanjung Lantai 1

- P. Denah Pasar Tanjung Lantai 2
- Q. Pedoman Wawancara
- R. Dokumentasi Penelitian
- S. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- T. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- U. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- V. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Pasar Kabupaten Jember
- W. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Pasar Kabupaten Jember Unit Pasar Tanjung



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdapat beberapa sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola oleh masing-masing daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Menurut Halim (2001:102), PAD menjadi sumber penerimaan daerah yang paling berpotensi untuk menciptakan kemandirian daerah. Hal ini dikarenakan perekonomian suatu daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki penerimaan PAD cukup besar. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Sepuluh Penerimaan PAD Kabupaten/Kota Terbesar  
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016**

No.	Kabupaten/Kota	Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)
1.	Kota Surabaya	16.193.540.171.000	28,39
2.	Kabupaten Sidoarjo	5.119.613.512.000	8,98
3.	Kabupaten Gresik	3.355.814.698.000	5,88
<b>4.</b>	<b>Kabupaten Jember</b>	<b>1.952.757.794.000</b>	<b>3,42</b>
5.	Kabupaten Malang	1.890.404.622.000	3,31
6.	Kabupaten Pasuruan	1.825.192.594.000	3,20
7.	Kota Malang	1.627.664.376.000	2,85
8.	Kabupaten Mojokerto	1.570.904.739.000	2,75
9.	Kabupaten Tuban	1.357.041.575.000	2,38
10.	Kabupaten Jombang	1.327.020.036.000	2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016, data diolah tahun 2017 (Lampiran E).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Penerimaan PAD Kabupaten/Kota terbesar di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2016 adalah Kota Surabaya dengan penerimaan sebesar Rp 16,193 triliun atau 28,39%. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dengan total penerimaan masing-masing sebesar Rp 5,119 triliun atau 8,98% dan Rp 3,355 triliun atau 5,88%. Sedangkan Kabupaten Jember berada di posisi keempat dengan total penerimaan Rp 1,952 triliun atau 3,42%.

Penerimaan PAD Kabupaten Jember yang menempati posisi keempat di Jawa Timur berasal dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, retribusi daerah lebih bersifat terbuka sehingga pemerintah daerah memiliki peluang untuk menambah jenisnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi daerah juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dalam penyediaan barang dan fasilitas publik. Penyediaan barang dan jasa publik tersebut menjadi bagian dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah untuk mencegah terjadinya monopoli dalam pengelolaan sumber-sumber perekonomian bersama. Hal ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember adalah penyediaan fasilitas publik berupa pasar tradisional. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasal 1 pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar tradisional tersebut diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat, baik pedagang maupun pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan memenuhi kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar daerah pemerintah Kabupaten Jember.

Keberadaan pasar tradisional di Kabupaten Jember selain berfungsi sebagai pelayanan, juga memiliki fungsi untuk menambah penerimaan PAD melalui pemungutan retribusi pelayanan pasar. Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar menurut Perda Kabupaten Jember No. 4 Tahun 2011 pasal 64 adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar



tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember merupakan salah satu sumber PAD yang cukup potensial. Retribusi pelayanan pasar menjadi kontributor retribusi daerah terbesar ketiga di Kabupaten Jember. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Lima Besar Kontribusi Jenis-Jenis Retribusi terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2012- 2016**

No.	Objek Retribusi	Realisasi (Rp)	Kontribusi
1.	Ret. Pelayanan Kesehatan	100.433.320.804	46,22
2.	Ret. Pelayanan Parkir Berlangganan	45.307.854.000	20,85
<b>3.</b>	<b>Ret. Pelayanan Pasar</b>	23.491.658.150	<b>10,81</b>
4.	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	9.288.928.381	4,28
5.	Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	8.678.318.750	3,99

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2012-2016, data diolah tahun 2017 (Lampiran F).

Data pada tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember memiliki kontribusi sebesar 10,81% bagi pendapatan retribusi daerah dalam lima tahun terakhir. Kontribusi retribusi pelayanan pasar masih lebih besar bila dibandingkan dengan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 4,28% dan 3,99%. Hal ini menempatkan retribusi pelayanan pasar sebagai kontributor pendapatan retribusi daerah terbesar ketiga di Kabupaten Jember.

Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember tersebut berasal dari pemungutan retribusi yang dilakukan di 31 unit pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dari seluruh unit pasar tersebut, Unit Pasar Tanjung dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian karena Pasar Tanjung memiliki potensi pengelolaan terbesar sekaligus merupakan pasar induk di Kabupaten Jember. Selain itu, Pasar Tanjung juga menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3 Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Per Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016**

No.	Nama Pasar	Jumlah	%
1.	<b>Pasar Tanjung</b>	<b>3.050.313.890</b>	<b>21,85</b>
2.	Pasar Balung	1.246.999.700	8,93
3.	Pasar Rambipuji	1.146.397.900	8,21
4.	Pasar Ambulu	1.118.403.200	8,01
5.	Pasar Kalisat	1.071.611.700	7,68
6.	Pasar Tanggul	843.957.600	6,05
7.	Pasar Gebang	573.955.000	4,11
8.	Pasar Bangsalsari	456.842.300	3,27
9.	Pasar Puger	438.794.000	3,14
10.	Pasar Jenggawah	411.937.200	2,95

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Per Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016, data diolah tahun 2017 (Lampiran G).

Data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa Pasar Tanjung merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember dalam tiga tahun terakhir. Pasar Tanjung mampu menyumbang sebesar 21,85% dari total penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seperempat dari penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember berasal dari Pasar Tanjung.

Kewenangan terhadap pengelolaan retribusi pelayanan pasar dimiliki oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Kewenangan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember kepada Dinas Pasar Kabupaten Jember melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember. Menurut Perbup Jember No. 59 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pasar. Tugas dari Dinas Pasar Kabupaten Jember dijelaskan lebih lanjut dalam Perbup Jember No. 59 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa tugas pokok dari Dinas Pasar adalah sebagai berikut.

- a. Membina, mengelola, dan mengembangkan Dinas Pasar;
- b. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat;
- c. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya;
- d. Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi, sewa, dan jasa lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan Pasar.

Berdasarkan tugas pokok yang telah disebutkan, tugas yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember mencakup tugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan tugas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Tugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang dimaksud adalah pelayanan dalam penyediaan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan tertib bagi pedagang dan pengunjung pasar. Hal ini terdapat dalam Perbup Jember No. 59 Tahun 2008 pasal 3 poin (b), (c), (d), dan (f). Sedangkan tugas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar terdapat dalam Perbup Jember No. 59 Tahun 2008 pasal 3 poin (e).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan, Dinas Pasar Kabupaten Jember menyusun visi dan misi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan organisasi. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Pasar yang Memiliki Daya Saing dan Efisien”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pasar Kabupaten Jember merumuskannya ke dalam misi organisasi. Misi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah (1) meningkatkan pelayanan pada masyarakat; (2) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan (3) meningkatkan efisiensi manajemen pasar. Visi dan misi tersebut harus dapat diwujudkan dalam kinerja organisasi. Visi dan misi tersebut tidak akan memiliki makna bila tidak teraktualisasikan dalam kinerja

organisasi beserta indikatornya. Oleh karena itu, Dinas Pasar Kabupaten Jember dituntut untuk mencapai kinerja yang optimal.

Menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:102) secara garis besar pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua pendekatan. Pertama, pendekatan kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri. Kedua, pendekatan kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa. Kedua pendekatan tersebut mencerminkan sikap yang saling berinteraksi di antara keduanya karena organisasi publik sangat terkait dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, kinerja organisasi publik menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:103) didefinisikan sebagai hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, sesuai dengan visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember sebagai organisasi publik yang dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja yang optimal tidak lepas dari permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai pencapaian target penerimaan retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember, Bapak Abdul Mukti (wawancara 29 Desember 2016 pukul 09.50 WIB), target penerimaan retribusi pelayanan pasar merupakan target yang diberikan kepada setiap unit pasar untuk dapat memenuhi penerimaan retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran (1 Januari sampai 31 Desember di tahun yang sama). Target tersebut ditentukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember berdasarkan potensi masing-masing pasar yang ditentukan oleh jumlah toko/kios di masing-masing LTU dan luas tempat usaha yang ditempati oleh masing-masing pedagang. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penetapan target penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung selama satu tahun anggaran



Walaupun Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember, akan tetapi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Unit Pasar Tanjung beberapa kali masih belum bisa memenuhi target yang telah diberikan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data sebagai berikut.

**Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar di Pasar Tanjung Kabupaten Jember Tahun 2012-2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Toko/Kios yang Terisi	Jumlah Toko/Kios yang Kosong
2012	1.221.641.000	1.221.969.350	848	403
2013	1.170.805.000	1.032.607.340	799	452
2014	1.170.805.000	996.793.590	789	462
2015	1.126.970.500	1.020.912.960	944	307
2016	1.094.000.000	1.101.346.750	1.003	248

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2017.

Data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung pada tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi sedangkan target penerimaan retribusi yang ditetapkan mengalami penurunan. Pencapaian target penerimaan retribusi pelayanan pasar tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,67%. Sedangkan pencapaian target penerimaan retribusi pelayanan pasar terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 85,14%.

Rendahnya realisasi target penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti disebabkan oleh sikap petugas yang kurang tegas dalam melakukan pemungutan retribusi. Hal ini membuat banyak pedagang yang mengalami penunggakan dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar. Tercatat pada tahun 2010-2016 jumlah tunggakan retribusi yang belum dibayarkan oleh pedagang di Pasar Tanjung mencapai Rp 887.315.950,00. Selain itu, sulitnya pendataan terhadap pedagang yang menempati los dan pelataran Pasar Tanjung juga menjadi kendala dalam pemenuhan target tersebut. Hal ini disebabkan oleh keberadaan pedagang yang

yang menempati los dan pelataran yang tidak menentu sehingga sulit untuk diprediksi dalam penentuan target.

Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung juga mengalami permasalahan terkait kurangnya jumlah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bendahara Penerima Pembantu Unit Pasar Tanjung, Sunarso, S.H., diungkapkan bahwa saat ini jumlah pegawai yang dimiliki oleh Unit Pasar Tanjung sebanyak 32 orang tenaga PNS dan 41 tenaga sukwan. Jumlah tersebut dirasa masih kurang bila dibandingkan dengan luas Pasar Tanjung yang mencapai 25.105 m<sup>2</sup>. Hal ini membuat beberapa pegawai harus memiliki beban kerja tambahan dan merangkap tugas.

Selain itu, sarana dan prasarana yang terdapat di Unit Pasar Tanjung berdasarkan hasil observasi masih kurang memenuhi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Bangunan Pasar Tanjung sejak tahun 1976 belum pernah direnovasi secara menyeluruh dan hanya dilakukan pengecatan ulang sehingga membuat banyak terjadi kebocoran atap di beberapa titik. Selain itu, kondisi truk sampah dan bak sampah yang tersedia di Pasar Tanjung masih belum mampu menampung besarnya sampah sisa aktivitas pasar setiap harinya. Hal ini membuat pengunjung Pasar Tanjung merasa tidak nyaman serta membuat kondisi semakin terlihat kumuh dan tidak terawat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jember. Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dengan menggunakan konsep kinerja organisasi publik yang disampaikan oleh Kumorotomo dan Purwanto (2005:103). Konsep kinerja organisasi publik tersebut mengandung indikator kinerja berupa efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, sesuai dengan visi dan misi organisasi, output yang berkualitas, keadilan, serta sarana dan prasarana. Peneliti akan menggunakan indikator-indikator kinerja organisasi publik tersebut untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah menurut Sugiyono (2005:31) adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan tertentu karena akan memberikan arah pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Usman dan Akbar (2009:29), tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Sedangkan menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21), tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari deskripsi sementara dari asumsi. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian yang baik harus mampu memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain. Menurut Wardiyanta (2006:90), manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21), manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas.



Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat penelitian tersebut, dapat dirumuskan beberapa manfaat penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti sebagai berikut.

a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya hasil-hasil ilmu pengetahuan dalam bidang kinerja organisasi publik, khususnya mengenai kinerja dinas pengelola retribusi pelayanan pasar.

b. Secara praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai kinerja organisasi publik. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kinerja dari Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar agar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Jember dan memberikan pelayanan di bidang pasar.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) menjelaskan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pengertian tentang konsep juga dijelaskan oleh Silalahi (2012:112) bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori yang terkait dengan kinerja Dinas Pasar Kabupaten Jember Unit Pasar Tanjung dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Teori tersebut digunakan oleh peneliti karena dianggap sesuai dengan paradigma yang digunakan oleh peneliti. Teori tersebut juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan kinerja organisasi publik dari prespektif birokrasi itu sendiri dan prespektif kelompok sasaran. Berdasarkan penjelasan tersebut konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Organisasi Publik dalam Administrasi Publik. Teori mengenai organisasi publik dalam administrasi publik dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan salah satu bentuk dari organisasi publik. Dinas Pasar Kabupaten Jember mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pasar dan melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar atas jasa yang diberikan. Organisasi publik dalam tinjauan administrasi publik memiliki peran yang penting karena merupakan salah satu dimensi strategis dari administrasi publik. Oleh karena

itu, pokok pembahasan organisasi publik ini akan mengedepankan pada aspek kinerja organisasi publik.

- b. Kinerja Organisasi Publik. Teori mengenai kinerja organisasi publik dalam skripsi ini digunakan untuk menjelaskan tentang kinerja dari Dinas Pasar Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Pasar Kabupaten Jember akan dianalisis dari prespektif birokrasi itu sendiri dan prespektif kelompok sasaran. Teori organisasi publik tersebut akan menjelaskan kinerja Dinas Pasar Kabupaten Jember berdasarkan indikator kinerja organisasi publik yang disampaikan oleh Kumorotomo dan Purwanto (2005).
- c. Pengelolaan. Teori mengenai pengelolaan digunakan untuk menjelaskan terkait proses pengeloaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Proses pengelolaan yang dimaksud adalah proses pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang terkait dengan pelayanan dalam penyediaan fasilitas pasar dan pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagai balas jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember.
- d. Retribusi Pelayanan Pasar. Teori mengenai retribusi pelayanan pasar digunakan untuk menjelaskan retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember. Pembahasan mengenai retribusi pelayanan pasar dalam skripsi ini akan mengedepankan pada aspek objek, subjek, dan tata cara pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

## **2.2 Organisasi Publik dalam Administrasi Publik**

Organisasi publik dalam skripsi ini akan dibahas dalam konteks Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam tinjauan administrasi publik merupakan organisasi publik. Hal ini dikarenakan Dinas Pasar Kabupaten Jember memiliki tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum di bidang pasar. Menurut Dwight Waldo dalam Syafiie, dkk. (1999:26) administrasi publik diartikan sebagai manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia

dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3), administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* (kepentingan publik) dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah proses perpaduan antara manajemen dan organisasi dalam memecahkan masalah publik dan mencapai tujuan publik.

Administrasi publik sebagai salah satu disiplin ilmu selalu mengalami pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma tersebut mempengaruhi cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, serta cara untuk memecahkan masalah yang dianut oleh administrator publik. Salah satu paradigma yang muncul adalah *New Public Management (NPM)*. Paradigma *NPM* muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Menurut Vigoda (2003) dalam Keban (2014:36) *NPM* dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Keberadaan *NPM* tersebut memberikan doktrin terhadap administrasi publik agar menerapkan manajemen profesional dalam sektor publik, memberikan penekanan yang lebih besar terhadap kontrol *output*, serta penggunaan indikator kinerja.

Pergeseran paradigma dalam administrasi publik membuatnya memiliki beberapa dimensi strategis. Dimensi-dimensi tersebut merupakan unsur pokok yang menentukan dinamika administrasi publik untuk mencapai tujuan. Menurut Keban (2014:10-12) administrasi publik memiliki enam dimensi strategis. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dimensi kebijakan. Dimensi ini menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan.

2. Dimensi struktur organisasi. Dimensi ini menyangkut pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Dimensi manajemen. Dimensi ini menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir, dan dikendalikan) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen.
4. Dimensi etika. Dimensi ini memberikan tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan apa yang buruk.
5. Dimensi lingkungan. Dimensi ini merupakan suasana atau kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada.
6. Dimensi akuntabilitas kinerja. Dimensi ini memberikan suatu bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik.

Administrasi publik selain memiliki beberapa dimensi juga memiliki beberapa fungsi. Menurut Haryono (2002) dalam Umar (2004:6) administrasi memiliki tiga fungsi dasar sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan publik, diantaranya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan melalui proses, seperti analisis situasi pada waktu tertentu, alternatif perubahan di masa mendatang, penyusunan strategi dan program, dan evaluasi penilaian strategi dan program.
2. Pengendalian perilaku organisasi dan organisasi publik, yang meliputi struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, tata usaha kantor, dan hubungan masyarakat.
3. Penggunaan teknologi manajemen publik, yang meliputi kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan pengawasan.

Ketiga fungsi dasar tersebut menunjukkan bahwa organisasi merupakan salah satu bidang yang terus dikaji dalam administrasi publik.



Secara etimologi organisasi berasal dari kata Yunani “*organon*” yang berarti alat atau instrumen. Organisasi menurut Shafritz dan Russel dalam Keban (2014:127) diartikan sebagai suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Charrington dalam Sembiring (2012:12) menambahkan bahwa organisasi merupakan sistem sosial yang mempunyai pola kerja teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian organisasi menurut Hasibuan (2013:6) adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua individu atau lebih, dan berfungsi atas dasar sesuatu yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Hasibuan (2013:59), organisasi berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi publik dan organisasi bisnis. Organisasi publik adalah organisasi non profit yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa memperhitungkan laba rugi. Tujuannya adalah memberikan pelayanan dan bukan memperoleh laba (*non profit oriented*). Sedangkan organisasi bisnis adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan mendapatkan laba dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba (*profit oriented*).

Ulum (2009:2) menambahkan bahwa perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat dari sifat dan karakteristik berikut.

1. Tujuan organisasi.

Organisasi sektor publik mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, sedangkan sektor swasta bertujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan. Tujuan organisasi yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah (1) mewujudkan sarana dan prasarana pasar yang baik; (2) menciptakan pasar yang kondusif melalui kelembagaan pedagang; dan (3) mencapai target retribusi dari seluruh unit pasar. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah pelayanan kepada masyarakat sekaligus juga mencari keuntungan melalui penerimaan retribusi.

## 2. Sumber pembiayaan.

Sumber pendanaan organisasi sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, iuran anggota, subsidi, dan sumbangan dari donatur. Perusahaan swasta mendapatkan sumber pembiayaan yang berupa pembiayaan internal dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, dan juga pembiayaan eksternal dari penerbitan saham. Sumber pembiayaan Dinas Pasar Kabupaten Jember menurut Perbup Jember No. 59 Tahun 2008 pasal 23 disebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pasar Kabupaten Jember dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## 3. Pola pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban organisasi sektor publik ditujukan kepada masyarakat (publik), sedangkan pertanggungjawaban sektor swasta lebih kepada pemegang saham dan kreditur. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember menurut Perbup Jember No. 59 Tahun 2008 pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Dinas Pasar Kabupaten Jember bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Selain itu, Dinas Pasar Kabupaten Jember juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada Bupati yang melalui pemilihan umum.

## 4. Struktur organisasi.

Struktur organisasi sektor publik adalah birokratis, kaku, dan hirarkis. Sektor swasta memiliki struktur organisasi yang fleksibel yaitu datar, piramida, dan lintas fungsional. Struktur organisasi dari Dinas Pasar Kabupaten Jember telah ditetapkan oleh Perbup Jember No. 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dinas Pasar Kabupaten Jember juga dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember lebih bersifat birokratis dan hirarkis.



## 5. Karakteristik anggaran.

Karakteristik anggaran organisasi sektor publik adalah terbuka untuk publik, sedangkan karakteristik anggaran sektor swasta cenderung tertutup untuk publik. Anggaran dari organisasi sektor publik disusun dalam APBN/APBD yang diwujudkan dalam Undang-Undang tentang APBN dan Perda tentang APBD. Undang-Undang dan Perda tersebut dipublikasikan kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

## 2.3 Kinerja Organisasi Publik

### 2.3.1 Definisi Kinerja Organisasi Publik

Kinerja Organisasi publik dalam skripsi ini akan dibahas dalam konteks kinerja Dinas Pasar Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Kinerja (*performance*) menurut Moehersono (2012:95) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Menurut Sembiring (2012:82) kinerja adalah sebuah hasil kerja (*output*) dari suatu proses (konversi) tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber daya (*resources*), data dan informasi, kebijakan, dan waktu tertentu yang digunakan sebagai masukan (*input*). Sedangkan menurut Suyadi dalam Widodo (2008:78) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika.

Swanson (dalam Keban, 2014:211) mengklasifikasi kinerja menjadi tiga tingkatan yaitu kinerja “proses”, kinerja “individu” dan kinerja “organisasi”. Kinerja proses menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang dalam organisasi memungkinkan organisasi tersebut mencapai misi dan tujuan para individu serta apakah proses pengembangan keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. Kinerja individu mempersoalkan apakah tujuan individu sesuai dengan

misi organisasi, apakah individu menghadapi hambatan dalam bekerja dan mencapai hasil, dan apakah mereka memiliki motivasi tinggi, pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman dalam bekerja. Dan kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, budaya yang ada, apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumberdayanya.

Menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:102) secara garis besar pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua pendekatan. Pertama, pendekatan kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri. Kedua, pendekatan kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa. Kedua pendekatan tersebut mencerminkan sikap yang saing berinteraksi di antara keduanya karena organisasi publik sangat terkait dengan lingkungannya. Berdasarkan keterkaitan antara organisasi publik dengan lingkungannya yang kompleks tersebut dapat dirumuskan konsep mengenai kinerja organisasi publik. Menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:103) kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, sesuai dengan visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

### **2.3.2 Indikator Kinerja Organisasi Publik**

Indikator kinerja organisasi menurut Moeheriono (2012:108) diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi kinerja saja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif sehingga tidak dapat dihitung. Kumorotomo dan Purwanto (2005:103)

mendefinisikan bahwa kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (*output*) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, sesuai dengan visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan konsep kinerja organisasi publik yang telah disampaikan oleh Kumorotomo dan Purwanto (2005:103) tersebut, maka dapat diambil beberapa indikator kinerja yang terkandung didalamnya. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sesuai dengan tujuan organisasi

Salah satu indikator kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Kumorotomo dan Purwanto (2005:105) adalah kesesuaian hasil (*output*) dengan tujuan organisasi atau yang biasa disebut sebagai efektivitas. Efektivitas mempertanyakan apakah tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut telah tercapai atau belum. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan yang diemban oleh organisasi tersebut. Selanjutnya Mahmudi (2007:84) menambahkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, dimana efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Output dalam pelayanan publik dapat berupa tingkat keberhasilan atau kesuksesan organisasi, program, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2010-2015, tujuan dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung adalah (1) mewujudkan sarana dan prasarana pasar yang baik, (2) menciptakan pasar yang kondusif melalui kelembagaan pedagang, dan (3) mencapai target retribusi dari seluruh unit pasar. Berdasarkan tujuan dari organisasi tersebut, *output* dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dikatakan baik apabila telah sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan. Disamping itu pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat mengenai penghimpunan sumber-sumber dana publik dan tujuan penggunaannya. Menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:107) akuntabilitas merupakan indikator kinerja organisasi publik yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Selanjutnya Mahmudi (2007:18) menambahkan bahwa pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

## 3. Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu indikator kinerja organisasi publik yang cukup penting. Menurut Halim (2002:130) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah dapat merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata



biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

#### 4. Responsivitas

Responsivitas menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:107) adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

#### 5. Sesuai dengan visi dan misi organisasi

Visi dan Misi organisasi publik merupakan gambaran mengenai tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. Menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:43) visi adalah pegangan yang mampu memberi arah bagaimana sebuah organisasi akan memberdayakan dirinya dalam menghadapi tantangan perubahan dan merupakan petunjuk jalan bagi segenap jajaran organisasi dalam menyongsong masa depan. Visi pada dasarnya mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Sedangkan misi merupakan ruang lingkup kegiatan yang sedang dan hendak dilakukan oleh sebuah organisasi yang mampu mendefinisikan maksud dan tujuan eksistensinya serta keunikan dirinya dibandingkan organisasi lain. Misi mencoba menjawab pertanyaan mengenai apa yang akan coba dilakukan oleh organisasi publik atau apa kepentingan dari organisasi.



#### 6. *Output* yang berkualitas

Setiap organisasi publik dituntut untuk dapat memuaskan masyarakat dengan memberikan *output* yang berkualitas. Menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:106-107) isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

#### 7. Keadilan

Keadilan menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:105) mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan, dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

#### 8. Sarana dan Prasarana

Menurut Kumorotomo dan Purwanto (2005:106) Sarana dan prasarana menyangkut fasilitas penyelenggaraan pelayanan yang bersifat fisik seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung seperti komputer, serta berbagai kelengkapan alat kantor yang memudahkan akses bagi masyarakat pengguna jasa.

### 2.4 Pengelolaan

Pengelolaan dalam skripsi ini akan dibahas dalam konteks pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengertian pengelolaan menurut Balderton dalam Adisasmita (2011:21) adalah sama dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha

manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Hamalik dalam Adisasmita (2011:22) istilah pengelolaan identik dengan manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Follet dalam Keban (2014:91), manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian pengelolaan dan manajemen dapat disamakan. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya juga dapat disamakan. Menurut Alison (1997) dalam Keban (2014:107), manajemen atau pengelolaan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

1. Menciptakan tujuan dan prioritas.
2. Menyusun rencana operasional
3. Melakukan pengorganisasian dan *staffing*.
4. Mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian.
5. Mengendalikan kinerja.
6. Berurusan dengan unit-unit luar.
7. Berurusan dengan organisasi-organisasi independen.
8. Berurusan dengan media masa dan publik.

Sementara itu, Donovan dan Jackson (1991) dalam Keban (2014:107) memberikan rincian terhadap tugas manajemen atau pengelolaan sebagai berikut.

1. Perencanaan, yang terdiri atas menciptakan kebijakan, tujuan, dan standar; mengembangkan aturan dan prosedur; mengembangkan rencana; melakukan ramalan; menganalisis lingkungan; dan mengevaluasi efektivitas perencanaan.
2. Pengorganisasian, yang terdiri atas membagi tugas pekerjaan kepada setiap orang; menciptakan struktur yang sesuai secara fungsional dan sosial; mendelegasikan otoritas; menciptakan garis otoritas dan komunikasi; koordinasi semua pekerjaan bawahan; dan mengevaluasi efektivitas proses pengorganisasian.
3. *Staffing*, yang terdiri atas menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan; merekrut orang yang berprospek baik; menyeleksi pegawai; melakukan

*training* dan pengembangan *staff*; melakukan penilaian kinerja; dan melakukan evaluasi terhadap program *staffing*.

4. *Leading*, yang terdiri atas mendorong orang untuk melakukan pekerjaannya; menjaga atau memelihara semangat kerja; memotifasi para *staff*; menciptakan iklim organisasi yang kondusif; dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan.
5. *Controlling*, yang terdiri atas menetapkan standar; menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan; mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas; dan mengevaluasi kinerja.

## **2.5 Retribusi Pelayanan Pasar**

### **2.5.1 Retribusi Daerah**

Menurut Prawirohardjono (1984) dalam Adisasmita (2011:109) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Munawir (1985:3) menambahkan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ketiga pengertian tersebut dapat memberikan ciri pokok dari retribusi.

- a. Retribusi daerah dipungut oleh pemerintah daerah.
- b. Retribusi daerah dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa-jasa yang disediakan daerah.
- c. Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atau jasa yang diberikan pemerintah daerah.
- d. Pemungutan retribusi dapat dipaksakan.

Ketentuan mengenai retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Adisasmita (2011:113) retribusi dan pajak dalam prakteknya sulit dibedakan, akan tetapi dalam konsepnya terdapat perbedaan yang cukup jelas. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi**

No	Keterangan	Pajak	Retribusi
1.	Jenis	Iuran	Bukan iuran
2.	Hukum	Wajib	Tidak wajib
3.	Sifat	Memaksa	Tidak memaksa
4.	Kontraprestasi	Tidak ada	Ada

Sumber: Rahardjo Adisasmita (2011:113)

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Berikut adalah penjelasan dari ketiga golongan retribusi tersebut.

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum adalah sebagai berikut.
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
  6. Retribusi Pelayanan Pasar.
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut.
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
  3. Retribusi Tempat Pelelangan.
  4. Retribusi Terminal.
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan.
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  10. Retribusi Penyeberangan di Air.
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  3. Retribusi Izin Gangguan.
  4. Retribusi Izin Trayek.
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.



Sunarto (2005:133-135) menyebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai retribusi daerah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang retribusi ini diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah tentang retribusi daerah disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dalam rangka dilakukannya fungsi pengawasan. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan membatalkan peraturan daerah yang dimaksud. Pembatalan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah yang dimaksud.
- b. Peraturan Daerah tidak berlaku surut. Peraturan ini dimaksudkan agar retribusi daerah yang telah ditetapkan bila suatu saat bertentangan atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat ditinjau kembali pelaksanaannya.
- c. Peraturan Daerah tentang retribusi mengatur beberapa hal sebagai berikut.
  1. Nama, objek, dan subjek retribusi.
  2. Golongan Retribusi.
  3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
  4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
  5. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
  6. Wilayah pemungutan.
  7. Tata cara pemungutan.
  8. Sanksi administrasi.
  9. Tata cara penagihan.
  10. Tanggal mulai berlakunya.
  11. Masa Retribusi.
  12. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.

13. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.
- d. Larangan pungutan retribusi untuk diborongkan. Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.
- e. Sarana pemungutan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

### 2.5.2 Pelayanan Publik

Definisi pelayanan menurut Moenir (2002:17) adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Definisi tentang pelayanan juga disampaikan oleh Boediono (2003:60) bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Sedangkan definisi pelayanan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Istilah publik menurut Sinambela (2006:5) berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Menurut Kencana dalam Sinambela (2006:5) publik dapat juga diartikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar baik berdasarkan nilai-nilai dan norma.

Pelayanan publik menurut Surat KEMENPAN No.63 Tahun 2003 dapat diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. penyelenggara pelayanan publik dalam instansi pemerintah. Pelayanan publik menurut Istianto (2009:125-126) adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat

baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Kegiatan pelayanan publik merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pembangunan.

Perkembangan pelayanan publik dalam paradigma *New Publik Management (NPM)* dipengaruhi oleh teori-teori yang berasal dari manajemen bisnis, salah satunya adalah *Total Quality Management (TQM)* atau yang biasa disebut dengan Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Pengaruh penerapan MMT terhadap pelayanan publik memberikan kesadaran akan pentingnya perhatian terhadap kualitas pelayanan dan pemuasan pelanggan. Hal ini bertujuan agar organisasi publik dapat memiliki daya saing serta dapat memenuhi tuntutan publik yang semakin meningkat.

Menurut Sinambela (2006:44-45) MMT memang berasal dari organisasi bisnis, namun terdapat beberapa penekanan dalam MMT yang dapat diadaptasi pada organisasi publik. Beberapa penekanan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kualitas adalah pekerjaan setiap orang dalam organisasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik.
- b. Kualitas muncul dari pencegahan, bukan hasil dari pemeriksaan atau inspeksi.
- c. Kualitas menuntut kerja sama yang erat, semua orang dalam organisasi adalah penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Kualitas menuntut perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ditekankan bahwa pada saat diperlukan perubahan, misalnya dalam sistem dan prosedur, tindakan yang cepat perlu ditempuh agar tidak terjadi keterlambatan dalam mengejar kualitas pelayanan.

Penekanan terhadap kualitas pelayanan yang dipengaruhi oleh penerapan MMT tersebut bertujuan untuk mencapai kepuasan kelompok sasaran atau pelanggan. Pelanggan menurut Gasperz dalam Pasolong (2011:131) adalah masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jenis-jenis pelayanan publik atau mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari kebijakan-kebijakan organisasi publik. Berdasarkan definisi

tersebut, pelanggan dalam organisasi publik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal.

- a. Pelanggan internal (*internal customer*) mencakup unit-unit atau pegawai dalam suatu organisasi publik yang terkena dampak dari produk dan merupakan anggota organisasi yang menghasilkan produk tersebut.
- b. Pelanggan eksternal (*external customer*) mencakup mereka yang terkena dampak dari produk, tetapi bukan anggota organisasi penghasil produk (pelanggan eksternal adalah masyarakat).

### 2.5.3 Pasar

Pasar menurut Stanton (1994) dalam Herlambang (2014:15) adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, barang atau jasa yang ditawarkan, dan terjadi perpindahan kepemilikan. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pasar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (1) pasar tradisional, (2) pusat perbelanjaan, dan (3) toko modern. Perpres RI No. 112 Tahun 2007 Pasal 1 memberikan penjelasan terkait definisi dari masing-masing jenis pasar tersebut.

1. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar..

2. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
3. Toko Modern adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pasar Tanjung termasuk dalam pasar tradisional. Hal ini tampak dari kriteria yang dimiliki oleh Pasar Tanjung sebagai Pasar Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Kriteria tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar daerah Pemerintah Kabupaten Jember. Menurut Perbup Jember Nomor 8 Tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa kriteria Pasar Daerah adalah sebagai berikut.

1. Dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Transaksi dilakukan secara tawar menawar.
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

#### **2.5.4 Retribusi Pelayanan Pasar**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 64 dijelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah:

“Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.”

Los yang dimaksud dalam Perda tersebut adalah bangunan tetap maupun tidak tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu



dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit. Retribusi pelayanan pasar tersebut dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Obyek retribusi pelayanan pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah. Selain obyek retribusi pelayanan pasar, terdapat juga subyek retribusi pelayanan pasar. Subyek retribusi pelayanan pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan./menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Badan yang dimaksud dalam Perda tersebut adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koprasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Usaha lainnya.

Tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember ditentukan berdasarkan pada klasifikasi pasar dan Letak Tempat Usaha (LTU). Klasifikasi pasar terdiri atas pasar kelas utama, kelas I, kelas II, serta kelas III, sedangkan LTU pasar terdiri atas LTU I, LTU II, LTU III, LTU IV, serta LTU V. Penentuan tarif tersebut didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai biaya pengganti pengelolaan yang diatur dalam Perda Kabupaten Jember No. 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Tarif tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Jember**

Kelas Pasar	LTU	Tarif (Rp/ m <sup>2</sup> /hari)
Kelas Utama	LTU I	400
	LTU II	350
	LTU III	250
	LTU IV	200
	LTU V	2500
Kelas I	LTU I	300
	LTU II	250
	LTU III	200
	LTU IV	150
	LTU V	1500
Kelas II	LTU I	250
	LTU II	200
	LTU III	150
	LTU IV	100
	LTU V	1250
Kelas III	LTU I	200
	LTU II	150
	LTU III	100
	LTU IV	100
	LTU V	1000

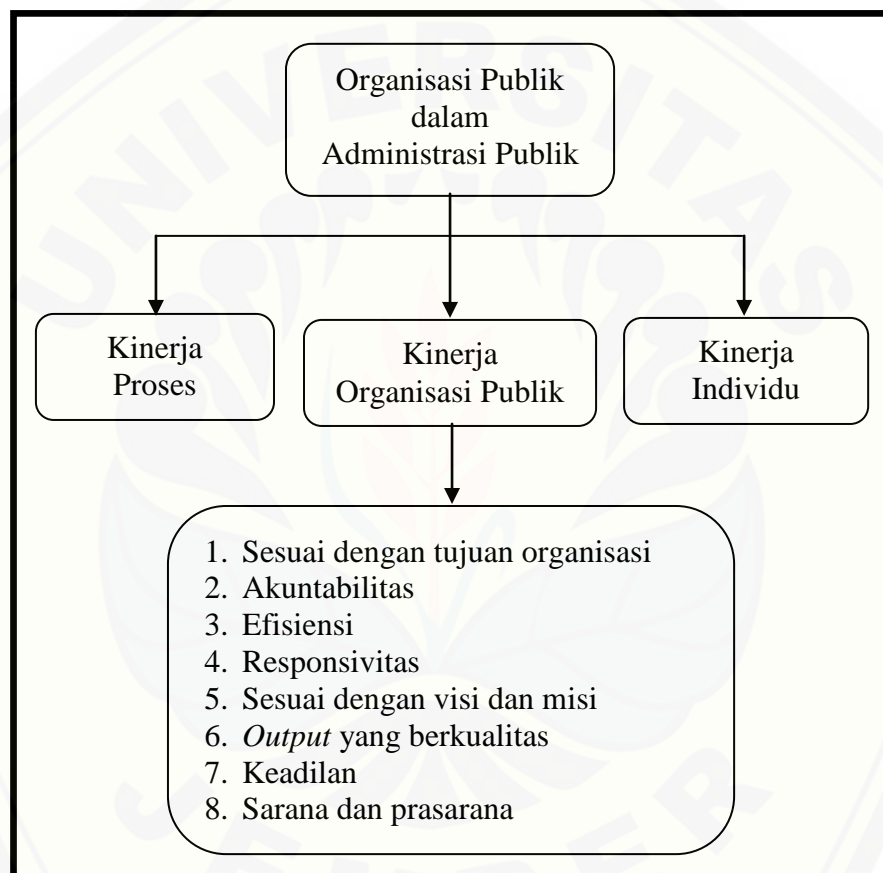
Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011, data diolah.

**Keterangan:**

1. LTU I, yaitu toko atau kios yang menghadap keluar.
2. LTU II, yaitu toko atau kios yang menghadap kedalam.
3. LTU III, yaitu toko atau kios, bedak, dan los tertutup.
4. LTU IV, yaitu los terbuka di dalam pasar.
5. LTU V, yaitu halaman pasar di dalam atau di luar area sekitar pasar.

## 2.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen retribusi pelayanan pasar di Dinas Pasar Unit Pasar Kabupaten Jember. Peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini sehingga tujuan dari penelitian ini dapat dicapai. Kerangka berpikir yang telah dibuat oleh peneliti dapat ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Sumber: Penulis berdasarkan literatur, 2017.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2005:1), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menjadi aspek epistemologis yang penting sehingga dapat disampaikan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan dalam setiap penelitian yang dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala atau fenomena lainnya. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian merupakan hal yang dipersiapkan peneliti sebelum melakukan penelitian untuk menentukan metode atau cara yang digunakan ketika melakukan penelitian di lapangan.

Menurut Silalahi (2012:6) metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Cara yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Tahapan-tahapan yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut.

- 1. Jenis penelitian.**
- 2. Tempat dan waktu penelitian.**
- 3. Data dan sumber data.**
- 4. Penentuan informan penelitian.**
- 5. Teknik dan alat pengumpulan data.**
- 6. Teknik menguji keabsahan data.**
- 7. Teknik penyajian dan analisis data.**

### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul serta permasalahan penelitian yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan menurut Creswell (1994) dalam Silalahi (2012:77) penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan proses investigasi yang di dalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan dan mengklasifikasikan objek penelitian. Peneliti kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam kondisi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan instrumen kunci dalam kegiatan penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Tan dalam Silalahi (2012:28-29) memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Selain itu, jenis penelitian deskriptif menurut Arikunto dalam Prastowo (2012:111) tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian.



Jadi, penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Menggunakan paradigma kualitatif dengan jenis deskriptif tersebut, diharapkan peneliti dapat menjelaskan serta menggambarkan tentang Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar secara sistematis, faktual, holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat dan waktu penelitian yang ditentukan oleh peneliti harusnya memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas adalah Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata pencapaian target terendah di Kabupaten Jember pada tahun 2012-2016.
2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar menjadi kontributor terbesar ketiga bagi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jember pada tahun 2012-2016.
3. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung menjadi kontributor terbesar bagi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jember pada tahun 2012-2016, namun rata-rata penerimaan tersebut belum bisa mencapai target.
4. Terdapat beberapa permasalahan mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang mempengaruhi kinerja dari Dinas Pasar Unit Pasar

Tanjung Kabupaten Jember seperti minimnya jumlah SDM dan kondisi sarana prasarana yang kurang memadai.

Batasan waktu penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah pada tanggal 29 Oktober 2016 sampai 29 Januari 2017. Sedangkan rentang waktu yang menjadi sasaran penelitian adalah pada tahun 2012-2016.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari sumber data. Menurut Sugiyono (2005:15) data menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan.

Sumber data adalah uraian asal tentang diperolehnya data penelitian. Menurut lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006:112), Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi dua jenis.

#### **3.3.1 Data primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau objek yang akan diteliti. Data primer menurut Umar (2004:64) merupakan data yang didapatkan dari sumber utama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data primer adalah data individu atau kelompok berbentuk angket, wawancara, dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada informan terkait kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar serta observasi dan dokumentasi langsung oleh peneliti. Berikut daftar sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini.

1. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Tri Tjahjono adalah sebagai berikut.
  - a. Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember.
  - b. Peraturan terkait pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
  - c. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar untuk memenuhi visi dan misi serta tujuan organisasi.
  - d. Kendala dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.
  - e. Proses koordinasi antara Dinas Pasar terhadap Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung
  - f. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memadai di Pasar Tanjung.
2. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Abdul Mukti adalah sebagai berikut.
  - a. Proses pemungutan retribusi pelayanan pasar.
  - b. Penerimaan retribusi pelayanan pasar di seluruh unit pasar.
  - c. Kendala dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar.
  - d. Proses pelaporan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
3. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Agus Minanto adalah sebagai berikut.
  - a. Data gaji pegawai PNS dan sukwan.
4. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Rudi Haryono adalah sebagai berikut.
  - a. Data pengeluaran Dinas Pasar untuk Pasar Tanjung.
5. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Sunarso adalah sebagai berikut..
  - a. Pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung.
  - b. Kendala dalam proses pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung.
  - c. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan.

- d. Kendala dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang hendak dicapai.
  - e. Proses pelaporan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung.
  - f. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung untuk menciptakan efisiensi.
  - g. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung untuk menunjukkan sikap responsif.
  - h. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung untuk memberikan *output* yang berkualitas.
  - i. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung untuk memberikan keadilan bagi pedagang pasar.
  - j. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memadai.
  - k. Faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi di Pasar Tanjung.
6. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Rahmad Taufik Hidayat adalah sebagai berikut.
- a. Penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung.
  - b. Pembagian tugas dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung.
  - c. Faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi di Pasar Tanjung.
  - d. Kondisi sarana kantor dan pasar di unit Pasar Tanjung.
7. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Iskandar adalah sebagai berikut.
- a. Profil Pasar Tanjung
  - b. Pendapatan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung
  - c. Faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi di Pasar Tanjung.
8. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Slamet Ichsan adalah sebagai berikut.
- a. Proses pengamanan di Pasar Tanjung.
  - b. Kendala dalam pelaksanaan proses pengamanan di Pasar Tanjung.

9. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Merita Tisna Maya adalah sebagai berikut.
  - a. Proses pemungutan retribusi harian di Pasar Tanjung.
  - b. Kendala dalam pemungutan retribusi harian di Pasar Tanjung.
  - c. Faktor yang mempengaruhi pendapatan retribusi di Pasar Tanjung.
10. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Miskadi adalah sebagai berikut.
  - a. Sistem kebersihan di Pasar Tanjung.
  - b. Pembagian petugas kebersihan di Pasar Tanjung.
  - c. Kendala dalam proses pembersihan Pasar Tanjung.
11. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap Syamsul Arifin Bustami adalah sebagai berikut.
  - a. Tanggapan yang disampaikan terkait pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
  - b. Responsivitas petugas terhadap keluhan pedagang.
  - c. Kondisi kebersihan, keamanan, dan ketertiban Pasar Tanjung.
  - d. Keadilan layanan di Pasar Tanjung.
  - e. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Pasar Tanjung.
12. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap pedagang Pasar Tanjung adalah sebagai berikut.
  - a. Tanggapan yang disampaikan terkait pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
  - b. Responsivitas petugas terhadap keluhan pedagang.
  - c. Kondisi kebersihan, keamanan, dan ketertiban Pasar Tanjung.
  - d. Keadilan layanan di Pasar Tanjung.
  - e. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Pasar Tanjung.
13. Informasi yang diperoleh dari wawancara terhadap pembeli Pasar Tanjung adalah sebagai berikut.
  - a. Tanggapan yang disampaikan terkait pengelolaan retribusi pelayanan pasar.
  - b. Responsivitas petugas terhadap keluhan yang disampaikan.



- c. Kondisi kebersihan, keamanan, dan ketertiban Pasar Tanjung.
- d. Keadilan layanan di Pasar Tanjung.
- e. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Pasar Tanjung.

### 3.3.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi bagi peneliti berupa informasi pendukung. Menurut Silalahi (2012:291) data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa gambar, catatan, dan dokumen yang terkait dengan kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Berikut daftar sumber data sekunder beserta informasi yang terkandung di dalamnya yang digunakan oleh peneliti.

**Tabel 3.1 Data Sekunder Penelitian**

No.	Data	Sumber Data
1.	Penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	<i>E-Book</i> Badan Pusat Statistik Indonesia
2.	Kontribusi jenis-jenis retribusi terhadap penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jember	Dokumen Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3.	Kontribusi penerimaan per unit pasar terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember	Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Jember
4.	Realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung	Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember
5.	Profil Dinas Pasar Kabupaten Jember	Dokumen Dinas Pasar Kabupaten Jember
6.	Biaya pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Unit Pasar Tanjung	Dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember
7.	Tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Jember	Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Peneliti, berdasarkan hasil observasi, 2017.

### 3.4 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan didasarkan pada pengetahuannya tentang data atau informasi yang diperlukan. Peneliti mencari orang-orang yang benar-benar tahu tentang informasi yang diperlukan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar. Informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif singkat.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive* merupakan teknik pengambilan informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Sedangkan *snowball* menurut Silalahi (2012: 272) merupakan prosedur pemilihan informan secara bertahap. Langkah pertama diidentifikasi orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *key informant*. Kemudian *key informant* tersebut dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai informan terkait dan orang ini juga dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain yang terkait sebagai informan lagi. Demikian proses ini berlangsung hingga terpenuhi data yang dibutuhkan.

Berdasarkan definisi mengenai teknik penentuan informan tersebut, peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dapat memberikan informasi terkait kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Berikut informan-informan yang terdapat dalam penelitian ini.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No.	Nama	Keterangan
1.	Tri Tjahjono	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pasar Kabupaten Jember
2.	Abdul Mukti	Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Kabupaten Jember
3.	Agus Minanto	Bendahara Gaji Dinas Pasar Kabupaten Jember
4.	Rudi Haryono	Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Jember
5.	Sunarso	Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pasar Tanjung
6.	Rahmad Taufik Hidayat	Bagian Pembukuan Pasar Tanjung
7.	Iskandar	Urusan Tata Usaha Pasar Tanjung
8.	Slamet Ichsan	Koordinator Urusan Keamanan dan Ketertiban Unit Pasar Tanjung
9.	Merita Tisna Maya	Koordinator Retribusi Harian
10.	Miskadi	Koordinator Urusan Kebersihan
11.	Syamsul Arifin Bustami	Ketua Gabungan Pedagang Tradisional Pasar Tanjung dan Sekitarnya (GERPAST)
12.	Hartatik	Pedagang Pasar Tanjung
13.	Yudistira	Pedagang Pasar Tanjung
14.	Lilis Suryani	Pedagang Pasar Tanjung
15.	Suyitno	Pedagang Pasar Tanjung
16.	Riana	Pedagang Pasar Tanjung
17.	Singgih Wicaksono	Pembeli di Pasar Tanjung
18.	Ahmad Agus	Pembeli di Pasar Tanjung
19.	Bella Pradilla	Pembeli di Pasar Tanjung
20.	Lestari	Pembeli di Pasar Tanjung

Sumber: Peneliti, berdasarkan hasil observasi, 2017.

### 3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian kualitatif harus segera di analisis dalam bentuk laporan. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:24), teknik dan alat perolehan data adalah uraian

yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Pemerolehan data penelitian dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, tes, atau pengukuran. Sedangkan alat perolehan data dapat berbeda-beda bergantung pada macam penelitian dan jenis serta bentuk data yang akan dicari, seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, proses, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **3.5.1 Observasi**

Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini diperlukan alat bantu seperti kamera, alat perekam, dan alat pencatat.

Lebih jauh lagi Usman dan Akbar (2009:54) mengklasifikasikan jenis-jenis teknik observasi menjadi tiga.

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi.
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis.
- c. Eksperimental atau lawannya noneksperimental.

Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi sistematis. Teknik observasi sistematis sendiri menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Peneliti akan mengamati langsung dengan membuat kerangka observasi terlebih dahulu agar mempermudah dalam memperoleh data.

### **3.5.2 Dokumentasi**

Menurut Usman dan Akbar (2009:69), dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Guba dan

Lincoln dalam Moloeng (2006:217) menyebutkan mengenai syarat tentang data yang akan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

- a. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk penelitian.
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang sesuai dengan syarat tersebut. Selain itu, dokumen tersebut juga harus berkaitan dengan kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

### **3.5.3 Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pangaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi & Suwandi, 2008:127). Menurut Sugiyono (2005:157), wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Teknik wawancara ini biasa digunakan bila peneliti telah mengetahui pasti informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Teknik wawancara ini biasa digunakan untuk penelitian pendahuluan atau bahkan untuk penelitian yang lebih mendalam untuk responden.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam-dalamnya informasi yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Selain itu, informan juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan leluasa dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti



### 3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan keabsahan data merupakan bagian dari pembuktian keilmiah suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moleong (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang harus dipelajari peneliti untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini.

**Tabel 3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

No.	Kriteria	Teknik Pemeriksaan
1.	Kredibilitas (derajat kepercayaan)	a. Perpanjangan keikutsertaan b. Ketekunan pengamatan c. Triangulasi d. Pengecekan sejawat e. Kecukupan referensial f. Kajian kasus negatif g. Pengecekan anggota
2.	Kepastian	h. Uraian rinci
3.	Kebergantungan	i. Audit kebergantungan
4.	Kepastian	j. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327).

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

#### 3.6.1 Ketekunan pengamatan

Seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Oleh karena itu seorang peneliti menurut Moleong (2014:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

### 3.6.2 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) sebagai berikut.

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan oleh peneliti dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan untuk menentukan topik pembahasan. Selanjutnya peneliti akan menambahkan beberapa pertanyaan untuk menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh informan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengajukan berbagai macam pertanyaan yang bervariasi sehingga diharapkan dapat menggali informasi secara lebih mendalam.
2. Mengecek dengan berbagai sumber data. Selain berpedoman terhadap hasil wawancara sebagai sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Data wawancara yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan dokumen yang terkait dan begitu pula sebaliknya. Hal ini bertujuan agar informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar dapat dipercaya.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Pengecekan kepercayaan yang dilakukan dalam penelitian ini selain menggunakan triangulasi juga didukung dengan ketekunan pengamatan dan pengecekan sejawat yang dilakukan oleh peneliti. Kedua teknik tersebut diharapkan dapat menambah derajat kepercayaan dari data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencocokkan antar data yang diperoleh. Seperti mencocokkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu narasumber dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber lain atau mencocokkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi maupun observasi.

### **3.6.3 Pengecekan Sejawat**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos atau mempublikasikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini hanya sebatas melakukan diskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing dengan melakukan bimbingan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

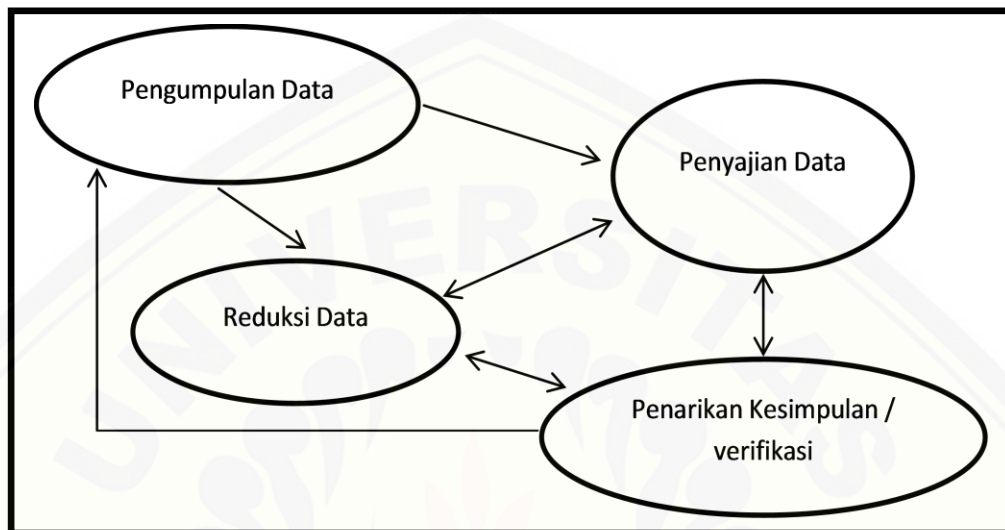
### **3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Basrowi dan Suwandi (2008:193) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:192), analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknis analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339-341) yang terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

Teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dapat dijelaskan dengan gambar berikut.



**Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif**

Sumber: Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti mulai dari tahap observasi awal hingga penelitian ini berakhir, yaitu mulai bulan oktober 2016 sampai januari 2017. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara terkait topik pembahasan. Data yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan teknik tersebut berupa dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan, permusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dengan proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Data hasil pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder dalam penelitian ini kemudian dipetakan berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Selain itu, peneliti juga mengecek data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat. Ketiga teknik tersebut digunakan agar data yang ditampilkan dalam hasil penelitian ini memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Dalam tahapan ini peneliti juga melakukan display (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya.

Data yang telah direduksi dalam penelitian ini kemudian disajikan dalam beberapa bentuk tabel dan uraian rinci. Penggunaan dua jenis penyajian data tersebut dipilih karena dapat membantu peneliti dalam memberikan deskripsi terkait topik penelitian. Tabel dan uraian rinci juga dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada. Kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data hasil penelitian dengan menggunakan teori dan konsep kinerja organisasi publik yang telah ditentukan. Peneliti terlebih dahulu melakukan analisis dan pembahasan yang terdapat pada BAB 4 dalam skripsi ini. Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan yang terdapat pada BAB 5.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja organisasi publik dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung sebagai berikut.

1. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi kesesuaian dengan tujuan organisasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dengan hasil yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sarana kantor dan sarana kebersihan yang tersedia di Pasar Tanjung serta buruknya prasarana berupa bangunan pasar. Banyaknya pedagang yang tidak mematuhi Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 juga membuat pasar menjadi kurang kondusif. Selain itu, rata-rata pencapaian target penerimaan retribusi pelayanan pasar di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung pada tahun 2012-2016 adalah sebesar 92,92% sehingga belum bisa memenuhi target.
2. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi akuntabilitas menunjukkan adanya ketimpangan antara pertanggungjawaban terhadap pihak *agent* dan pertanggungjawaban kepada pihak *principal*. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung hanya berorientasi pada target penerimaan retribusi pelayanan pasar yang dibebankan oleh Dinas Pasar berupa pencatatan dan pelaporan, namun melupakan kewajiban kepada masyarakat untuk menyediakan fasilitas pasar yang bersih, tertib, dan aman.
3. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi efisiensi menunjukkan bahwa biaya pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang telah dilakukan lebih besar bila dibandingkan dengan hasil retribusi yang didapatkan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata rasio efisiensi yang dihasilkan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung pada tahun 2012-2016 adalah sebesar 168,91%.

4. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi responsivitas menunjukkan bahwa Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung telah memberikan kemudahan akses dalam penyewaan dan pembayaran retribusi. Akan tetapi, Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung belum dapat memberikan pelayanan pasar dengan baik serta belum menunjukkan sikap yang cepat tanggap dalam menanggapi keluhan.
5. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi kesesuaian dengan visi dan misi organisasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara *output* organisasi yang dihasilkan terhadap visi dan misi yang ditetapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari belum tercapainya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam meningkatkan pelayanan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung juga belum dapat meningkatkan PAD Kabupaten Jember karena target penerimaan retribusi yang ditetapkan pada tahun 2012-2016 menunjukkan adanya penurunan dan rata-rata penerimaannya hanya mencapai 92,92% dari target. Selain itu, upaya untuk meningkatkan efisiensi manajemen pasar juga belum tercapai karena rata-rata rasio efisiensi retribusi pelayanan pasar yang dikelola pada tahun 2012-2016 adalah sebesar 168,91%.
6. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi kualitas layanan yang diberikan menunjukkan bahwa kondisi kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar yang belum dapat dijaga dengan baik.
7. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi keadilan menunjukkan masih belum meratanya distribusi dan alokasi layanan yang diberikan.
8. Kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dari segi sarana dan prasarana menunjukkan bahwa terdapat penggunaan sebagian sarana dan prasarana yang masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 seperti sarana kantor dan sarana kebersihan yang kurang serta prasarana berupa bangunan pasar yang sudah tua.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung Kabupaten Jember dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung perlu melakukan restrukturisasi kepegawaian, terutama pada bagian keamanan, agar pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Tanjung dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung perlu meningkatkan responsivitas dari petugas dalam menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan agar dapat meningkatkan kepuasan pedagang dan pengunjung Pasar Tanjung.
3. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung perlu meningkatkan pelayanan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar agar dapat menciptakan pasar yang bersih, aman, dan rapi sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan retribusi pelayanan pasar.
4. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung perlu lebih bersikap tegas dalam menjalankan peraturan yang berlaku agar dapat memberikan rasa adil bagi setiap pedagang.
5. Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung perlu memperbaiki sarana dan prasarana pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pengelolaan retribusi pelayanan pasar dapat berjalan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2012-2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2013-2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2015-2016*. Buku 1. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herlambang, S. 2014. *Dasar-Dasar Pemasaran: Cara Mudah Memahami Ilmu Pemasaran*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Keban, YT. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kumorotomo, W & Purwanto E. A. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja, Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pop up design.



- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir, AS. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moloeng, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S. 1985. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, A. 2012. *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sembiring, M. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi: Prespektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokusmedia.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sinambela, LP. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: IKAPI.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, H. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Usman, H & Akbar, PS. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Widodo, J. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.

### **Jurnal**

Suryadharma, dkk. 2007. *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: SMERU.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993

Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/24/1.12/2016 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pejabat Pengelola Barang pada Dinas Pasar Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016.

KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Dokumentasi Penelitian









Lampiran E

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

No.	Nama Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)					Jumlah	%
		2012	2013	2014	2015	2016*)		
1.	Kota Surabaya	2.280.003.560.000	2.791.580.051.000	3.247.459.154.000	4.035.339.014.000	3.839.158.392.000	16.193.540.171.000	28,39
2.	Kabupaten Sidoarjo	669.617.557.000	858.433.671.000	1.115.332.939.000	1.272.446.650.000	1.203.782.695.000	5.119.613.512.000	8,98
3.	Kabupaten Gresik	427.588.706.000	502.777.031.000	700.587.793.000	799.884.870.000	924.976.298.000	3.355.814.698.000	5,88
<b>4.</b>	<b>Kabupaten Jember</b>	<b>255.804.611.000</b>	<b>308.383.350.000</b>	<b>441.605.617.000</b>	<b>461.882.363.000</b>	<b>485.081.853.000</b>	<b>1.952.757.794.000</b>	<b>3,42</b>
5.	Kabupaten Malang	197.890.263.000	260.582.630.000	411.182.984.000	625.876.738.000	394.872.007.000	1.890.404.622.000	3,31
6.	Kabupaten Pasuruan	194.858.675.000	278.165.170.000	421.442.630.000	478.269.057.000	452.457.062.000	1.825.192.594.000	3,20
7.	Kota Malang	229.810.290.000	317.850.424.000	406.772.634.000	306.160.385.000	367.070.643.000	1.627.664.376.000	2,85
8.	Kabupaten Mojokerto	167.054.638.000	219.150.021.000	357.924.994.000	413.002.680.000	413.772.406.000	1.570.904.739.000	2,75
9.	Kabupaten Tuban	192.490.540.000	227.120.525.000	291.079.944.000	345.965.621.000	300.384.945.000	1.357.041.575.000	2,38
10.	Kabupaten Jombang	164.389.354.000	185.091.676.000	304.065.301.000	363.963.252.000	309.510.453.000	1.327.020.036.000	2,33
11.	Kabupaten Bojonegoro	159.247.618.000	215.766.158.000	291.244.903.000	337.696.625.000	290.865.097.000	1.294.820.401.000	2,27
12.	Kabupaten Banyuwangi	140.326.556.000	183.235.877.000	283.488.703.000	346.992.331.000	307.162.564.000	1.261.206.031.000	2,21
13.	Kabupaten Kediri	128.252.589.000	194.826.497.000	291.948.593.000	314.168.587.000	291.774.546.000	1.220.970.812.000	2,14
14.	Kabupaten Lamongan	129.284.733.000	161.087.217.000	272.409.285.000	321.667.133.000	317.130.114.000	1.201.578.482.000	2,11
15.	Kabupaten Tulungagung	162.161.670.000	174.981.707.000	275.699.829.000	309.646.334.000	240.482.565.000	1.162.972.105.000	2,04
16.	Kabupaten Nganjuk	125.173.398.000	153.130.768.000	235.880.471.000	287.881.057.000	163.808.258.000	965.873.952.000	1,69
17.	Kota Kediri	122.522.873.000	144.562.729.000	207.526.194.000	221.927.134.000	191.731.518.000	888.270.448.000	1,56

No.	Nama Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)					Jumlah	%
		2012	2013	2014	2015	2016*)		
18.	Kabupaten Ponorogo	108.760.117.000	134.097.319.000	198.730.423.000	210.695.344.000	212.719.798.000	865.003.001.000	1,52
19.	Kabupaten Blitar	96.265.946.000	115.670.864.000	188.827.430.000	216.648.257.000	195.222.121.000	812.634.618.000	1,42
20.	Kabupaten Probolinggo	90.009.457.000	108.511.361.000	195.263.627.000	207.370.345.000	201.794.364.000	802.949.154.000	1,41
21.	Kabupaten Lumajang	101.173.802.000	112.406.823.000	194.076.104.000	212.585.093.000	177.205.204.000	797.447.026.000	1,40
22.	Kabupaten Sumenep	85.871.823.000	97.052.073.000	162.371.865.000	172.687.321.000	169.032.544.000	687.015.626.000	1,20
23.	Kabupaten Ngawi	63.287.008.000	87.081.649.000	169.237.013.000	191.166.217.000	161.921.573.000	672.693.460.000	1,18
24.	Kabupaten Pamekasan	83.373.493.000	89.463.706.000	171.518.203.000	170.258.936.000	142.771.056.000	657.385.394.000	1,15
25.	Kabupaten Bangkalan	80.253.709.000	92.722.420.000	135.785.489.000	175.624.054.000	165.985.225.000	650.370.897.000	1,14
26.	Kabupaten Magetan	78.444.432.000	87.859.707.000	141.162.943.000	164.564.900.000	145.800.000.000	617.831.982.000	1,08
27.	Kota Madiun	72.030.950.000	96.059.185.000	134.584.331.000	164.681.136.000	132.435.377.000	599.790.979.000	1,05
28.	Kabupaten Bondowoso	77.846.177.000	79.559.723.000	134.684.701.000	158.974.210.000	138.315.390.000	589.380.201.000	1,03
29.	Kabupaten Situbondo	67.050.481.000	78.043.408.000	129.640.578.000	148.507.959.000	163.607.757.000	586.850.183.000	1,03
30.	Kabupaten Trenggalek	70.197.614.000	77.799.518.000	132.951.069.000	155.254.335.000	142.209.750.000	578.412.286.000	1,01
31.	Kabupaten Madiun	68.545.791.000	83.428.636.000	120.673.156.000	149.628.356.000	151.441.496.000	573.717.435.000	1,01
32.	Kota Probolinggo	69.261.489.000	78.355.778.000	135.062.800.000	157.374.351.000	130.171.044.000	570.225.462.000	1,00
33.	Kabupaten Sampang	61.065.357.000	66.415.373.000	123.039.103.000	142.512.557.000	120.965.331.000	513.997.721.000	0,90
34.	Kota Mojokerto	53.564.905.000	74.944.029.000	90.269.505.000	142.709.392.000	122.036.527.000	483.524.358.000	0,85
35.	Kota Blitar	63.621.643.000	72.739.837.000	102.480.469.000	120.829.877.000	108.170.663.000	467.842.489.000	0,82
36.	Kabupaten Pacitan	57.298.240.000	62.952.487.000	101.276.945.000	126.449.078.000	109.873.269.000	457.850.019.000	0,80

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, 2012-2016.

\*) APBD

Lampiran F

Pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2012-2016

No.	Jenis Retribusi Daerah	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)					Jumlah	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1.	Ret. Pelayanan Kesehatan	20.901.799.597	20.714.381.457	37.562.175.750	9.706.449.750	11.548.514.250	100.433.320.804	46,22
2.	Ret. Pelayanan Parkir Berlangganan	7.908.822.000	8.576.707.000	9.024.768.000	9.740.043.000	10.057.514.000	45.307.854.000	20,85
<b>3.</b>	<b>Ret. Pelayanan Pasar</b>	<b>4.280.702.960</b>	<b>4.601.537.040</b>	<b>4.571.887.290</b>	<b>4.906.078.460</b>	<b>5.131.452.400</b>	<b>23.491.658.150</b>	<b>10,81</b>
4.	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	1.001.308.895	2.548.902.819	1.994.438.290	2.002.348.464	1.741.929.913	9.288.928.381	4,28
5.	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.536.612.500	1.673.516.250	1.810.506.000	1.770.464.500	1.887.219.500	8.678.318.750	3,99
6.	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.314.473.200	1.443.327.800	1.416.118.600	1.401.806.200	1.435.291.400	7.011.017.200	3,23
7.	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	871.468.200	916.258.820	855.470.950	905.124.200	1.023.091.950	4.571.414.120	2,10
8.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	601.691.615	874.246.815	808.892.589	953.443.769	911.792.238	4.150.067.026	1,91
9.	Ret. Terminal	866.546.600	814.534.500	819.571.500	751.699.000	745.212.500	3.997.564.100	1,84
10.	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	68.090.600	632.231.700	2.010.649.800	723.685.250	-	3.434.657.350	1,58
11.	Ret. Tempat Khusus Parkir	330.551.500	302.955.000	274.239.000	293.464.000	320.114.000	1.521.323.500	0,70
12.	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	148.378.800	413.596.600	504.181.500	44.412.000	46.866.000	1.157.434.900	0,53
13.	Ret. Izin Gangguan	99.590.890	102.095.020	152.400.352	190.217.016	234.237.750	778.541.028	0,36

No.	Jenis Retribusi Daerah	Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)					Jumlah	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
14.	Ret. Rumah Potong Hewan	140.121.000	142.444.000	149.978.000	153.108.000	154.388.000	740.039.000	0,34
15.	Ret. Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhr Sampah	-	-	-	287.199.000	234.500.000	521.699.000	0,24
16.	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	124.140.000	102.000.000	56.100.000	42.120.000	84.960.000	409.320.000	0,19
17.	Ret. Sewa Ruas Jalan Tertentu	-	-	-	222.252.500	172.069.500	394.322.000	0,18
18.	Ret. Penyedotan dan Penyediaan Kakus	67.878.000	27.490.000	88.852.000	93.042.000	84.888.500	362.150.500	0,17
19.	Ret. Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	113.672.000	188.611.000	-	-	-	302.283.000	0,14
20.	Ret. Pengangkutan Sampah Dari Sumbernya/Lokasi Pembuangan	-	-	-	124.561.000	119.522.000	244.083.000	0,11
21.	Ret. Sewa Rumah Dinas	-	54.870.000	53.900.000	50.700.000	68.820.000	228.290.000	0,11
22.	Ret. Izin Trayek	36.104.500	48.741.200	42.088.800	30.705.000	27.655.000	185.294.500	0,09
23.	Ret. Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	1.660.000	4.110.000	6.010.000	9.820.000	7.060.000	28.660.000	0,01
24.	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	19.500.000	0,01
25.	Ret. Izin Usaha Perikanan	-	3.300.000	5.275.000	5.200.000	-	13.775.000	0,01

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2012-2016.

## Lampiran G

## Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Per Unit Pasar di Kabupaten Jember Tahun 2014-2016

No.	Nama Pasar	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar				
		2014	2015	2016	Jumlah	%
1.	Pasar Tanjung	1.020.912.960	996.793.590	1.032.607.340	3.050.313.890	21,85
2.	Pasar Balung	437.885.000	405.161.900	403.952.800	1.246.999.700	8,93
3.	Pasar Rambipuji	416.151.400	374.335.500	355.911.000	1.146.397.900	8,21
4.	Pasar Ambulu	399.814.600	368.449.800	350.138.800	1.118.403.200	8,01
5.	Pasar Kalisat	389.373.100	348.153.700	334.084.900	1.071.611.700	7,68
6.	Pasar Tanggul	297.603.000	275.263.900	271.090.700	843.957.600	6,05
7.	Pasar Gebang	204.508.000	189.264.000	180.183.000	573.955.000	4,11
8.	Pasar Bangsalsari	169.029.900	147.507.400	140.305.000	456.842.300	3,27
9.	Pasar Puger	155.820.000	145.077.000	137.897.000	438.794.000	3,14
10.	Pasar Jenggawah	150.010.000	135.122.600	126.804.600	411.937.200	2,95
11.	Pasar Sukowono	145.988.000	135.054.000	126.847.000	407.889.000	2,92
12.	Pasar Tegalboto	110.535.200	101.587.200	101.616.200	313.738.600	2,25
13.	Pasar Mangli	109.685.000	104.370.000	90.288.000	304.343.000	2,18
14.	Pasar Umbulsari	104.115.000	95.805.200	91.118.000	291.038.200	2,08
15.	Pasar Johar	26.125.200	61.418.000	196.884.300	284.427.500	2,04



No.	Nama Pasar	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar				
		2014	2015	2016	Jumlah	%
16.	Pasar Mayang	102.719.000	84.755.000	80.896.500	268.370.500	1,92
17.	Pasar Manggis	93.533.900	85.055.700	81.159.000	259.748.600	1,86
18.	Pasar Gladak Merah	82.918.000	76.671.000	73.196.000	232.785.000	1,67
19.	Pasar Balung Kulon	71.258.000	65.628.000	64.303.300	201.189.300	1,44
20.	Pasar Kreongan	63.172.000	57.860.000	56.602.000	177.634.000	1,27
21.	Pasar Sempolan	98.969.500	41.018.500	33.148.500	173.136.500	1,24
22.	Pasar Tegal Besar	49.666.000	37.891.200	32.807.000	120.364.200	0,86
23.	Pasar Menampu	42.264.200	39.020.400	37.258.600	118.543.200	0,85
24.	Pasar Bungur	41.531.000	38.204.000	35.821.000	115.556.000	0,83
25.	Pasar Wirolegi	34.276.300	30.770.600	24.713.000	89.759.900	0,64
26.	Pasar Sukorejo	23.059.000	19.048.000	18.356.000	60.463.000	0,43
27.	Pasar Patrang	19.389.000	17.922.000	17.488.000	54.799.000	0,39
28.	Pasar Kencong	19.140.000	16.629.000	16.536.000	52.305.000	0,37
29.	Pasar Burung	12.897.000	11.346.000	11.236.000	35.479.000	0,25
30.	Pasar Petung	10.388.000	9.810.100	9.417.200	29.615.300	0,21
31.	Pasar Sukosari	3.332.200	3.304.500	3.324.800	9.961.500	0,07

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, 2014-2016.